



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat selanjutnya disebut Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. *Perbekel* adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah bagian dari penerimaan uang yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa.
12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan bahan material dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
13. Standar Harga Barang yang selanjutnya disingkat SHB adalah perkiraan harga barang yang menjadi acuan penyusunan RAB.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pedoman penyusunan APBDesa yaitu sebagai dasar Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa.

### Pasal 3

Tujuan pedoman penyusunan APBDesa adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan APBDesa yaitu:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
- b. prinsip penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. kebijakan penyusunan belanja desa;
- d. perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa.

## BAB III SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DESA

### Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan APBDesa Pemerintah Desa harus memperhatikan beberapa hal antara lain:
  - a. masih tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
  - b. kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan terutama dalam memperlancar akses bidang pertanian, kesehatan dan pendidikan;
  - c. membangkitkan semangat pengelolaan potensi Daerah dan Desa, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa kearah upaya peningkatan pendapatan masyarakat; dan
  - d. program Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dititikberatkan pada:
  - a. pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perekonomian lokal yang berbasis pada pertanian, pariwisata, dan industri kecil;
  - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - c. pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan;
  - d. menekan serendah-rendahnya angka pengangguran dan kemiskinan;

- e. mengembangkan manajemen pengelolaan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan, serta desa dapat menganggarkan dana pendampingan minimal 10% (sepuluh persen) dari dana kegiatan yang diterima sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
  - f. meningkatkan disiplin kerja dikalangan aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat;
  - g. menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien, efektif dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
  - h. mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya pembangunan masyarakat daerah yang sejahtera.
- (3) Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

#### BAB IV PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

##### Pasal 6

- (1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangan.
- (2) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Transparan, untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
- (4) Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.
- (6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

#### BAB V PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

##### Bagian Kesatu Substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

##### Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Desa :
  - a. dalam merencanakan target PAD, supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan asumsi perkembangan ekonomi pedesaan, yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan Desa;
  - b. dalam menganggarkan rencana pendapatan Desa dari hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai

- kekayaan Desa yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
- c. pemerintah Desa hendaknya mendayagunakan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD;
  - d. komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, pengembalian hasil pemeriksaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada Bank serta penerimaan lain dari kekayaan desa yang dipisahkan merupakan PAD;
  - e. pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran rencana pendapatan Desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya; dan
  - f. pendapatan Desa untuk penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBDesa, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa;
    2. dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
    3. penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar mencantumkan luasan persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
    4. rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk adalah atas nama Pemerintah Desa dan tidak dapat diubah atas nama pribadi, serta pencairannya hanya boleh dilakukan oleh bendahara desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu) dari *Perbekel*; dan
    5. swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai PAD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Desa, kepada Desa diberikan dana yang bersifat transfer yang terdiri atas jenis alokasi dana desa, dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi.
  - (3) Pemerintah Desa juga dapat memperoleh pendapatan dari pendapatan lainnya seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan Desa sah lainnya.
  - (4) Pencantuman rencana penerimaan hibah dalam APBDesa didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Bagian Kedua  
Belanja Desa

Pasal 8

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
    1. penghasilan tetap dan tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa; dan
    2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pencairan dana mendahului untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib dapat dilaksanakan sebelum APBDesa disahkan berdasarkan usulan Desa yang tertuang dalam peraturan *Perbekel*.
- (3) Belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain penghasilan tetap, honorarium staf, belanja rekening telepon, air dan listrik.
- (4) Dalam menetapkan anggaran belanja tidak terduga agar dipergunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang sifatnya :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. berada diluar kendali pemerintah desa.
- (5) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya tanggap darurat terhadap :
  - a. bencana alam :

yang termasuk dalam bencana alam yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan tanah longsor dan lainnya yang sejenis.
  - b. bencana sosial :

yang termasuk dalam bencana sosial yaitu konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- (6) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - d. pangan;
  - e. sandang dan peralatan sekolah;
  - f. pelayanan kesehatan;
  - g. penampungan serta tempat hunian sementara.

- h. pembangunan/rehabilitasi rumah untuk Rumah Tangga Miskin yang terkena bencana; dan
  - i. pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum yang terkena bencana
- (7) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yaitu :
- a. penyelamatan, evakuasi dan identifikasi korban konflik;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
  - d. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
  - e. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
  - f. penegakan hukum;
  - g. pengaturan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik; dan
  - h. penyelamatan harta benda korban konflik; dan
  - i. mediasi konflik.
- (8) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (9) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (10) Dalam penyusunan RAB belanja dapat mengacu pada SHB yang ditetapkan di Daerah.
- (11) Apabila nilai dalam SHB kabupaten tidak sesuai atau tidak dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan maka penyusunan RAB Belanja APBDesa dapat disesuaikan dengan harga pasar setempat sepanjang telah dilakukan survei harga.
- (12) Jumlah maksimal uang tunai yang disimpan di brankas Desa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya operasional kantor.
- (13) Dalam menyusun anggaran belanja dalam APBDesa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai :
    - 1. belanja pegawai merupakan belanja penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada masing-masing *Perbekel*, Perangkat Desa setiap bulan yang besarnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
    - 2. masing-masing Desa menganggarkan tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. Belanja Barang dan Jasa :
    - 1. dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya. Untuk kebutuhan *piodalan/aci-aci* dan belanja banten upacara yang menjadi kewajiban Desa dapat dianggarkan pada kode rekening berkenaan dalam batas-batas yang wajar dan dapat

- dipertanggungjawabkan, selain itu punia dalam bentuk barang dapat dianggarkan dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas, dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  3. honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Panitia, Narasumber, Tenaga Ahli, Juri dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium sesuai standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  4. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, pembinan dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan bertempat di Desa dapat diberikan uang saku, dan konsumsi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  5. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat Daerah/Provinsi dapat diberikan uang saku dan uang transport yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
  6. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat Daerah /Provinsi, yang diselenggarakan lebih dari 8 jam atau menginap dapat diberikan uang harian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
  7. belanja banten sehari-hari, *Purnama* dan *Tilem* sesuai standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  8. belanja honorarium untuk kader agar dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan peran aktif dari lembaganya
- c. Belanja Jasa Kantor :
1. untuk belanja telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata-rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah-langkah penghematan; dan
  2. belanja surat kabar/majalah, faximile/internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan.
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor :
- Biaya service, penggantian ban, penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas roda dua *Perbikel* dan Sekretariat sekali dalam setahun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- e. Belanja Bahan Bakar Minyak :  
Untuk mendukung operasional dimasing-masing Desa untuk Perbekel diperkenankan dengan standar 2 (dua) liter/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain *Perbekel* seperti perangkat desa, dihitung paling tinggi selama 22 (dua puluh dua) hari kerja yang memakai Kendaraan Dinas sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Untuk kegiatan yang bersifat koordinatif/konsultatif dan sejenisnya dapat diberikan BBM sebanyak 2 (dua) liter berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh *Perbekel*.
- g. Untuk operasional BPD dapat dianggarkan Premium/Pertamax/Pertalite paling banyak sama dengan *Perbekel* yang memakai kendaraan dinas.
- h. Belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun.
- i. Belanja Cetak dan Penggandaan  
Untuk biaya cetak dan penggandaan disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku.
- j. Belanja Makan Dan Minum :  
Dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, pembinaan, kursus, diklat/bimtek/penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi berupa makan dan minum. Penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat, dapat dipertanggungjawabkan, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk kegiatan seperti parade, lomba-lomba dan sejenisnya dianggarkan dalam rekening belanja makan dan minum pelatihan/pembinaan.
- k. Belanja Perjalanan Dinas.
  1. perjalanan Dinas Dalam Daerah  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat diberikan untuk kegiatan seperti rapat atau kegiatan lainnya berdasarkan surat undang dari penyelenggara kegiatan.
  2. perjalanan dinas dalam daerah dapat dibayarkan ketika memenuhi jarak tempuh minimal 5 (lima) kilometer dari Kantor Desa.
  3. besaran perjalanan dinas dalam adalah diatur sebagai berikut :
    - a) *perbekel* dan Badan Permusyawaratan Desa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali perjalanan;
    - b) perangkat Desa Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali perjalanan; dan
    - c) staf Desa Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali perjalanan.
  4. belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah :  
Untuk perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas.
  5. besaran perjalanan dinas dalam daerah adalah diatur sebagai berikut :

- a) *Perbekel* dan Badan Permusyawaratan Desa setara golongan (III) untuk satu kali perjalanan;
  - b) perangkat Desa setara golongan (II) untuk satu kali perjalanan; dan
  - c) staf Desa setara golongan (II) untuk satu kali perjalanan
1. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan Gedung.  
Untuk belanja Pembangunan Gedung diperkenankan bagi Desa yang tidak memiliki Gedung Kantor, atau karena alasan khusus lainnya seperti terkena bencana. Sedangkan untuk pemeliharaan gedung diperkenankan hanya untuk rehab.
  - m. Desa yang termasuk dalam wilayah Objek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK) yang telah ditetapkan oleh instansi terkait agar menganggarkan kegiatan untuk menunjang pengembangan GEOPARK Batur.
  - n. Belanja Pemeliharaan Komputer.  
Dalam menjaga kontinuitas operasional komputer, maka setiap Desa diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer paling banyak 5 unit komputer/laptop dalam setahun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - o. Belanja Pengadaan Pakaian Dinas.  
Penganggaran Belanja Pakaian Dinas diperkenankan untuk satu jenis pakaian dinas bagi *Perbekel*, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan staf Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
  - p. Belanja Sewa Kendaraan.  
Untuk mendukung kelancaran kegiatan yang telah direncanakan di setiap Desa, diperkenankan menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .
  - q. Belanja Hadiah  
Belanja hadiah dapat diberikan berupa uang tunai kepada pemenang lomba lomba yang diselenggarakan oleh Desa dengan rincian sebagai berikut :
    - a. lomba dengan kriteria beregu lebih dari 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba adalah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
    - b. untuk yang bersifat perorangan atau beregu sampai dengan 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - r. Belanja Modal  
Untuk penganggaran belanja modal diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti tanah, sepeda motor, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan lainnya.

## Bagian Ketiga Pembiayaan

### Pasal 9

- (1) Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan dapat dilakukan yang dananya bersumber dari hasil penyesihan pendapatan Desa
- (2) Pembentukan dana cadangan tidak boleh melampaui dari periode jabatan *Perbekel*.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal agar memperhatikan kemampuan BUM Desa dalam pengelolaan keuangan dan kemampuan pengembangan unit usahanya.

### Pasal 10

Penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), dalam penggunaannya agar disesuaikan dengan aturan yang mengikat pada sumber dana tersebut.

## Bagian Keempat Nomor Rekening

### Pasal 11

- (1) Pencantuman kegiatan dan belanja dalam APBDesa disesuaikan dengan nomor rekening masing-masing kegiatan.
- (2) Nomor rekening kegiatan dan rekening belanja dalam APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### Pasal 12

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan setelah perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, SH., MM  
PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003